PENGARUH ASPEK-APSEK KEMAKMURAN NEGARA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Margareta Dewi Perbawaningsih¹

Ari Budi Kristanto²

¹²Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Jawa Tengah

Surel: ari.kristanto@uksw.edu

Abstrak. Pengaruh Aspek-Aspek Kemakmuran Negara terhadap Kepatuhan Pajak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek-aspek kemakmuran negara terhadap kepatuhan pajak. Aspek kemakmuran tersebut meliputi masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan, dan perekonomian terbuka. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan indeks kemakmuran negara dari *The Legatum Institute Foundation* dan hasil penelitian tingkat upaya pajak (*tax effort*). Populasi dalam penelitian ini merupakan negara-negara di seluruh dunia dan berdasarkan *purposive sampling* terdapat 94 negara yang dijadikan sampel. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dan sebelumnya data telah diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat inklusif dan masyarakat terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel perekonomian terbuka berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan pajak sebagai upaya untuk mewujudkan kepatuhan pajak, melalui kebijakan yang mendorong inklusifitas dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Kemakmuran Negara, Masyarakat Inklusif, Masyarakat Terberdayakan, Perekonomian Terbuka

Abstract. The Influence of Country Prosperity Aspects on Tax Compliance. This study aims to examine the influence of country prosperity aspects towards tax compliance. The aspects consist of inclusive society, empowered people, and open economy. This study uses secondary data including the country prosperity index report from *The Legatum Institute Foundation* and the Level of Tax Effort. The population in this study are countries around the world and based on *purposive sampling*, 94 countries were sampled. This research hypothesis testing uses multiple regression analysis, and previously the data had been tested using the classical assumption test. The results of this study indicate that inclusive society and empowered people have a positive effect on tax compliance, while the open economy variable has a negative effect

on tax compliance. The results of this study are expected to be a consideration by the government in making tax policies as an effort to achieve the tax compliance, particularly in encouraging inclusive and empowered society.

Keywords: Tax Compliance, Country Prosperity, Inclusive Society, Empowered People, Open Economy

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak dianggap sebagai salah satu masalah yang menjadi perhatian utama sebagian besar pemerintah di dunia karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak (Mohdali & Pope, 2014). Gardner *et al.* (2019) mengatakan bahwa 91 perusahaan multinasional di Amerika Serikat terbukti tidak membayar *federal income tax*. Fenomena serupa terjadi di Uganda, dari 60 pengacara, hanya 13 pengacara yang membayar pajak penghasilan tahun 2013 (Kangave *et al.*, 2016). Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2018) mengatakan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia cukup rendah dibuktikan dari penerimaan pajak yang masih di bawah garis rata-rata. Ibrahim *et al.* (2015) mengatakan bahwa kepatuhan pajak yang rendah dapat menghambat pembangunan negara karena pendapatan pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan serta untuk membiayai kebutuhan negara lainnya. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar bagi negara untuk mendorong upaya mobilisasi penerimaan pajak dan pentingnya mengkaji terus-menerus faktor

yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak suatu negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mohdali dan Pope (2014) mengatakan bahwa religiusitas masyarakat Malaysia berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kompleksitas sistem perpajakan, pengetahuan pajak, pendidikan pajak juga turut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak di Selandia Baru dan Indonesia (Mukhlis *et al.*, 2015; Saad, 2014). Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, belum terdapat penelitian yang berfokus pada pengaruh kemakmuran suatu negara terhadap kepatuhan pajak. Kemakmuran negara memiliki indikator yang sama dengan kemajuan suatu negara dan menurut Umar *et al.* (2019) kemajuan negara berperan penting dalam penerimaan pajak. Negara yang maju mampu menyediakan lingkungan yang lebih kondusif yang membuat bisnis lebih mudah sehingga dapat menarik pajak lebih banyak. Selain itu, *The Legatum Institute Foundation* (2019) mengatakan bahwa negara makmur mampu memiliki lembaga efektif, ekonomi terbuka, serta

masyarakat terberdayakan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional, salah satunya dari penerimaan pajak.

Susanto (2012) menyatakan bahwa ciri negara yang makmur atau maju adalah memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Swedia merupakan salah satu negara makmur yang memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi, dibuktikan dari persentase kerugian akibat penghindaran pajak hanya sebesar 0,3% hingga 0,5% di sebagian besar periode (Nistotskaya & D'Arcy, 2018; STA, 2015). Selanjutnya, negara makmur seperti Denmark, Finlandia, dan Islandia menjadi negara dengan tingkat pembayaran pajak penghasilan tertinggi dengan persentase sebesar 55,89%; 53,75%; dan 46,24% melebihi rata-rata OECD yaitu 41,65% (KPMG, 2020). Hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara makmur seperti Amerika Serikat di mana masih banyak ditemukan penghindaran pajak. Sebanyak 379 dari 500 sampel perusahaan profit terbukti hanya membayar tarif *federal income tax* sebesar 11,3% dari 21% tarif wajib, bahkan 91 perusahaan tidak membayar pajak sama sekali (Gardner *et al.*, 2019). Oleh karena itu perlu dikaji lebih lagi terkait pengaruh kemakmuran negara terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini mengacu pada Chircop *et al.* (2018) yang meneliti tentang pengaruh modal sosial terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Penelitian tersebut berfokus pada variabel modal sosial yang menjadi salah satu pilar

inclusive society dari kemakmuran negara dan menyatakan bahwa modal sosial berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel bebas penelitian selain dari aspek *inclusive society* dari kemakmuran negara. Berdasarkan The Legatum Institute Foundation (2019), kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu *inclusive society*, *open economy*, dan *empowered people*. Maka dari itu, penelitian ini diperluas dengan menambahkan aspek-aspek kemakmuran lainnya yaitu *open economy* dan *empowered people* sebagai variabel bebas untuk diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak suatu negara. Dengan adanya sudut pandang yang lebih luas terkait kemakmuran negara, maka penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan konsep pengaruh kemakmuran terhadap kepatuhan pajak yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain; apakah *inclusive society* memengaruhi kepatuhan pajak suatu negara?; apakah *open economy* memengaruhi kepatuhan pajak suatu negara?; apakah *empowered people* memengaruhi kepatuhan pajak suatu negara?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aspek-aspek kemakmuran negara terhadap kepatuhan pajak suatu negara. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk membantu pemerintah di berbagai negara sebagai pertimbangan untuk

pembuatan kebijakan dalam upaya mewujudkan kepatuhan pajak. Selain itu penelitian dapat berguna sebagai tambahan literatur yang lebih komprehensif tentang pengaruh kemakmuran negara terhadap kepatuhan pajak, karena penelitian yang ada masih terbatas pada aspek masyarakat inklusif saja.

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak ialah ukuran sebagai sejauh mana seseorang atau organisasi mematuhi hukum dan peraturan pajak di negaranya (Young *et al.*, 2016). Kepatuhan pajak merupakan faktor kunci penerimaan pajak bagi sebuah negara. Semakin besar tingkat kepatuhan pajak, maka akan semakin besar pula penerimaan pajak oleh negara. Pendapatan pajak berperan penting dalam pembangunan negara. Dalam hal ini pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan serta untuk membiayai pengeluaran lain seperti program sosial maupun investasi infrastruktur (Ibrahim *et al.*, 2015). Kepatuhan pajak bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan karena banyak faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam menaati peraturan pajak.

Bărbuță-Mișu (2011) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan pajak akan berbeda untuk tiap-tiap negara karena aturan dan masalah yang dimiliki negara berbeda antara satu negara dengan negara

yang lainnya. Menurut Downs dan Stetson (2014) faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan atas faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi dapat dipengaruhi oleh aturan pajak itu sendiri, seperti tarif pajak, denda pajak, maupun manfaat pajak. Sedangkan untuk faktor non-ekonomi dapat dipengaruhi oleh norma pribadi, sosial, maupun keadilan yang dirasakan wajib pajak saat membayar pajak (Bărbuță-Mișu, 2011),

Kemakmuran Negara

Büyüksarıkulak dan Kahramanoğlu (2019) mengatakan bahwa kemakmuran merupakan suatu keadaan di mana masyarakat memiliki standar hidup yang lebih baik dan maju. Dengan demikian dapat diartikan negara makmur merupakan negara yang memiliki standar dan kualitas hidup masyarakat maupun pemerintah yang lebih baik dan maju. Menurut Umar *et al.* (2019) negara yang maju mampu memberikan fasilitas publik yang baik, sehingga kehidupan masyarakat terjamin dan masyarakat semakin percaya pada pemerintah. Aktaş Güzel *et al.* (2019); Muehlbacher *et al.* (2011) mengatakan bahwa semakin masyarakat percaya pemerintah, maka tingkat kepatuhan pajak semakin meningkat. Dengan demikian kemakmuran maupun kemajuan suatu negara berhubungan erat dengan tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kemakmuran negara tidak hanya diukur dengan melihat dari satu aspek saja. Berdasarkan *The*

Legatum Institute Foundation (2019), kemakmuran negara dapat diukur melalui tiga aspek yaitu masyarakat inklusif (*inclusive society*), perekonomian terbuka (*open economy*), dan masyarakat terberdayakan (*empowered people*).

Masyarakat yang inklusif merupakan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar kesetaraan, keadilan sosial, martabat manusia, serta pada prinsip-prinsip yang merangkul keanekaragaman (UNDESA, 2007). Dillenburger *et al.* (2015); UNDESA (2009) mengatakan bahwa masyarakat inklusif merupakan masyarakat yang selalu mempertimbangkan hak dan kewajiban yang dimiliki untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat inklusif mampu menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam *The Legatum Institute Foundation* (2019), masyarakat inklusif mengukur hubungan yang ada dalam masyarakat, baik individu dengan individu, maupun individu dengan pemerintah. Aspek ini terdiri atas empat pilar yaitu keselamatan dan keamanan, kebebasan pribadi, tata kelola, dan modal sosial.

Aspek kedua kemakmuran negara merupakan perekonomian terbuka yang menilai sejauh mana negara mampu mempromosikan bisnis dan perdagangan negara yang bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian negara (*The Legatum Institute Foundation*, 2019). Perekonomian terbuka dapat memberikan keuntungan bagi suatu negara,

khususnya dalam tersedianya lapangan pekerjaan (Geerken *et al.*, 2019). Menurut OECD (1998), keterbukaan perdagangan dan pasar menciptakan peluang baru bagi pekerja, konsumen, dan perusahaan, sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Perdagangan antar negara, wilayah, dan masyarakat merupakan hal mendasar bagi kemajuan inovasi, pengetahuan, dan produktivitas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.

Aspek terakhir dari kemakmuran negara adalah masyarakat yang terberdayakan (*empowered people*). Masyarakat yang terberdayakan merupakan masyarakat yang memiliki pola pikir ke arah yang lebih maju (Panjaitan & Siagian, 2019). Menurut *The Legatum Institute Foundation* (2019) masyarakat yang terberdayakan mampu memanfaatkan hal-hal yang dimilikinya untuk mengembangkan potensi yang ada. Dengan mengembangkan potensi yang dimiliki, masyarakat terberdayakan mampu berpartisipasi untuk meningkatkan kemakmuran sebuah negara. Dalam hal ini masyarakat yang terberdayakan dapat dilihat dari pendidikan, kondisi hidup, kesehatan, serta lingkungan alam.

Pengaruh *Inclusive Society* terhadap Kepatuhan Pajak Suatu Negara

Inclusive society (masyarakat inklusif) memiliki ciri bahwa masyarakat yang inklusif mampu

menghargai hukum atau aturan yang ada (UNDESA, 2007). Membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi wajib pajak yang tertulis dalam peraturan di tiap-tiap negara. Dalam hal ini, masyarakat yang inklusif seharusnya mampu menaati peraturan pajak yang ada. Selain karena memiliki sifat yang mampu menaati hukum, masyarakat inklusif juga mampu berperan aktif dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka (UNDESA, 2009). Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya beberapa penelitian terkait hubungan masyarakat inklusif dengan pajak jika dilihat dari pilar yang terkandung dalam masyarakat inklusif, yaitu modal sosial, tata kelola, keselamatan dan keamanan negara.

Chircop *et al.* (2018) mengatakan bahwa wajib pajak terutama perusahaan cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan beroperasi di tengah masyarakat bermodal sosial tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan beranggapan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Aspek masyarakat inklusif tidak hanya mengukur kualitas masyarakat, tetapi juga kualitas tata kelola serta keselamatan dan keamanan negara (*The Legatum Institute Foundation*, 2019). Menurut Sebele-mpofu (2020), kualitas tata kelola suatu negara memengaruhi tingkat kepatuhan pajak suatu negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa

semakin baik kualitas tata kelola negara, maka masyarakat akan semakin patuh terhadap aturan pajak karena masyarakat puas akan kinerja pemerintah. Penelitian lainnya Yamen *et al.* (2020) juga mengatakan semakin baik kualitas tata kelola negara, maka kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Selain itu, ketika keselamatan dan keamanan masyarakat terjamin, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat (Modugu & Anyaduba, 2014). Dengan demikian perumusan hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁: *Inclusive society* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh *Empowered People* terhadap Kepatuhan Pajak

Empowered people (masyarakat terberdayakan) merupakan orang-orang yang mampu menggunakan apa yang dimilikinya untuk mencapai potensi penuh mereka (*The Legatum Institute Foundation*, 2019). Masyarakat yang terberdayakan mampu memiliki pola pikir yang maju. Menurut Zainuddin (2018) seseorang yang memiliki pola pikir maju akan menyadari akan pentingnya pajak. Dengan demikian masyarakat akan membayar pajak dengan patuh karena menyadari bahwa pajak akan digunakan salah satunya untuk membiayai fasilitas publik yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang terberdayakan memiliki potensi lebih untuk taat dalam membayar pajak.

Masyarakat terberdayakan dapat dilihat dari kondisi hidup,

lingkungan alam, kesehatan, maupun pendidikan. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena semakin tinggi pendidikan, maka moral pajak akan meningkat dan tingkat penggelapan pajak berkurang (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018). Kirchler *et al.*, (2008); Tyas (2013) juga mengatakan semakin tinggi tingkat pendidikan, masyarakat semakin paham mengenai aturan perpajakan dan pentingnya pajak sehingga masyarakat akan menjadi semakin patuh pajak. Selanjutnya, Modugu dan Anyaduba (2014) mengatakan bahwa kepatuhan pajak negara akan meningkat ketika kesehatan dan pendidikan masyarakat terjamin. Selain itu, Nugrahanto (2017) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian masyarakat yang terberdayakan mampu memiliki kesadaran untuk patuh dalam membayar pajak. Kualitas hidup yang dimiliki masyarakat terberdayakan membuat masyarakat paham pentingnya untuk membayar pajak. Oleh karena itu perumusan hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂: Empowered people berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Pengaruh Open Economy terhadap Kepatuhan Pajak

Perekonomian terbuka ialah perekonomian yang melibatkan perdagangan antar negara, wilayah, dan masyarakat yang

merupakan hal mendasar bagi kemajuan inovasi, pengetahuan, dan produktivitas untuk menciptakan kemakmuran negara (The Legatum Institute Foundation, 2019). Adanya perekonomian terbuka menyebabkan pembuat kebijakan pajak suatu negara khawatir akan risiko kehilangan penerimaan pajak (Bartelsman & Beetsma, 2003). Kekhawatiran tersebut disebabkan karena ketika perekonomian suatu negara semakin terbuka, tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat terjadi karena beban pajak dalam perekonomian terbuka akan lebih besar dibandingkan ketika perekonomian tertutup sehingga mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai upaya dalam penghindaran pajak (Alison, 2007). Dengan demikian adanya perekonomian terbuka dapat menyebabkan risiko tingkat penghindaran pajak tinggi.

Penelitian tentang pengaruh *open economy* terhadap kepatuhan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Menurut Alison (2007), dengan adanya perekonomian terbuka, tingkat penghindaran pajak akan menjadi tinggi dan hal tersebut akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak suatu negara menjadi rendah. Penelitian serupa juga dilakukan Sikka dan Willmott (2010) yang mengatakan ketika perekonomian menjadi terbuka, wajib pajak akan memanfaatkan *transfer pricing* sebagai salah satu cara melakukan penghindaran pajak. Setiawan (2013) mengatakan *transfer pricing*

merupakan pengalihan pendapatan perusahaan dari satu negara bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah. Hal ini dapat menyebabkan penerimaan negara berkurang. Semakin banyaknya penghindaran pajak menyebabkan tingkat kepatuhan suatu negara menjadi rendah. Oleh karena itu, perumusan hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃: *Open economy* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Data, Populasi, dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan indeks kemakmuran negara tahun 2015 serta tingkat upaya pajak negara (*tax effort*) tahun 2015. Data diperoleh dari laporan *The Legatum Prosperity Index 2015* serta penelitian Mawejje dan Sebudde (2019). Dengan demikian populasi penelitian ini adalah negara-negara di seluruh dunia dengan sampel negara-negara yang terdaftar dalam *The Legatum Prosperity Index 2015* serta Mawejje dan Sebudde (2019).

Variabel Terikat Penelitian

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan ukuran sejauh mana wajib pajak patuh pada hukum dan aturan untuk membayar pajak (ATO, 2019). Dengan demikian jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka pendapatan pajak aktual negara tidak akan mampu mencapai

potensi pajak yang seharusnya diterima. Hal tersebut dapat menyebabkan tingkat upaya pajak (*tax effort*) suatu negara menjadi rendah. Tinggi atau rendahnya *tax effort* suatu negara dipengaruhi salah satunya oleh seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Khwaja & Iyer, 2014). Semakin tinggi kepatuhan pajak, maka *tax effort* yang dihasilkan negara akan semakin tinggi karena negara akan semakin mampu untuk mencapai potensi pajak. Menurut Mawejje dan Sebudde (2019), *tax effort* adalah ukuran sejauh mana pendapatan pajak aktual mampu mencapai potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *tax effort* sebagai indikator variabel kepatuhan pajak dan data yang dipakai mengacu pada hasil penelitian Mawejje dan Sebudde (2019). Penelitian tersebut menghitung potensi dan upaya pajak negara-negara di seluruh dunia berdasarkan *Government Revenue Dataset*.

Variabel Bebas Penelitian

Variabel bebas penelitian ini adalah *inclusive society* (masyarakat inklusif), *empowered people* (masyarakat terberdayakan), dan *open economy* (perekonomian terbuka). Variabel bebas dalam penelitian ini mengacu pada *The Legatum Institute Foundation* (2019), sehingga indikator-indikator untuk mengukur variabel bebas menggunakan indikator menurut *The Legatum Institute Foundation*. Masyarakat inklusif dapat diukur dari tingkat modal sosial,

keamanan dan keselamatan, kebebasan pribadi, serta tata kelola negara. Skor dari keempat indikator yang telah disebutkan akan dihitung rata-rata sehingga menghasilkan sebuah skor untuk masyarakat inklusif. Sama halnya dengan variabel masyarakat inklusif, variabel masyarakat yang terberdayakan dan perekonomian terbuka juga akan dihitung rata-rata dari penjumlahan masing-masing indikator yang terkandung di dalamnya. Masyarakat yang terberdayakan diukur menggunakan indikator pendidikan, kondisi hidup, kesehatan, serta lingkungan alam. Selanjutnya, variabel perekonomian terbuka diukur menggunakan lingkungan investasi, kondisi perusahaan, akses pasar dan infrastruktur, serta kualitas ekonomi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini memakai metode regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan program SPSS. Metode *multiple regression* digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat ketika variabel bebas lebih dari satu (Janie, 2012). Hal yang pertama dilakukan adalah melakukan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data seperti nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai minimal, dan nilai maksimal. Setelah melakukan statistik deskriptif adalah melakukan uji asumsi klasik untuk normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan, dan perekonomian terbuka terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu rumus penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PATUH_i = a_{0i} + \beta_1 INKLU_i + \beta_2 DAYA_i - \beta_3 BUKA_i + \varepsilon_i$$

Keterangan :

a : Konstanta

$PATUH_i$: Kepatuhan Pajak

$INKLU_i$: Masyarakat Inklusif

$DAYA_i$: Masyarakat Terberdayakan

$BUKA_i$: Perekonomian Terbuka

ε_i : Error

Kriteria pengujian penelitian ini menggunakan *alpha* (α) sebesar 5% (0,05), yang artinya risiko kesalahan yang dapat ditolerir dalam pengambilan keputusan adalah sebesar 5%. Oleh karena itu, hipotesis pertama dan kedua penelitian ini diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05

dan koefisien regresi bernilai positif. Hipotesis ketiga diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan populasi negara-negara yang ada di seluruh dunia sebanyak 195 negara. Berdasarkan teknik

purposive sampling, penelitian ini menggunakan sampel akhir sebanyak 94 negara dengan kriteria sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah
1. Negara-negara di seluruh dunia	195
2. Negara yang tidak terdaftar dalam laporan <i>Legatum Prosperity Index</i> tahun 2015 dan penelitian Mawejje dan Sebudde (2019)	(12)
3. Negara yang terdaftar dalam <i>Legatum Prosperity Index</i> tahun 2015 dan penelitian Mawejje dan Sebudde (2019) selain tahun 2015	(89)
Total Sampel Akhir	94

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif penelitian setelah data diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	St. Deviasi	Median
PATUH	0,03	0,96	0,4785	0,17400	0,4750
INKLU	37,82	86,18	60,7956	12,89711	57,2350
DAYA	35,02	84,26	67,5263	11,82496	68,1100
BUKA	26,96	79,38	55,7931	13,34766	56,3950

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-rata PATUH negara-negara di dunia adalah sebesar 0,4785 yang artinya sebagian besar negara di dunia mampu menghasilkan pajak aktual

sebesar 47,85% dari pajak potensial yang seharusnya. Negara yang memiliki nilai PATUH tertinggi adalah Norwegia, sedangkan yang terendah adalah Kuwait. Nilai rata-rata INKLU sebesar 60,7956

lebih besar dari median yaitu 57,2350 menunjukkan sebagian besar negara di dunia memiliki tingkat masyarakat inklusif yang tinggi. Negara yang memiliki tingkat masyarakat inklusif tertinggi adalah Norwegia, sedangkan yang terendah adalah Mesir. Selanjutnya, nilai rata-rata DAYA sebesar 67,5263 lebih kecil dari median yang berarti sebagian besar negara di dunia masih kurang dalam mencapai sebuah masyarakat yang terberdayakan. Tingkat masyarakat terberdayakan tertinggi dimiliki oleh negara Swedia, sedangkan yang terendah dimiliki oleh negara Chad. Selain itu, rata-rata nilai untuk BUKA sebesar 55,7931 lebih kecil dari median yaitu 56,3950 menunjukkan bahwa skor untuk perekonomian terbuka negara-negara di dunia rendah. Negara yang memiliki skor perekonomian terbuka tertinggi adalah Swiss, dan yang terendah adalah Chad.

Uji Asumsi Klasik

Data pada penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik untuk normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Penelitian ini menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov dan menghasilkan nilai *asympt sig.* sebesar 0,200. Oleh karena itu, penelitian ini telah lolos uji normalitas karena hasil nilai *asympt sig.* yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data

yang dipakai pada penelitian terdistribusi dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan Uji Glejser, model regresi penelitian ini terbukti tidak timbul masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai sig. untuk INKLU, DAYA, dan BUKA lebih besar dari 0,05. Pengujian multikolinearitas penelitian ini menggunakan nilai VIF (*Variances Inflating Factor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka dapat diartikan bahwa model regresi penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas. Penelitian ini memiliki nilai VIF untuk INKLU, DAYA, dan BUKA kurang dari 10 yang berarti tidak adanya korelasi antar variabel masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan, dan perekonomian terbuka, sehingga model regresi penelitian dinyatakan lolos uji multikolinearitas. Dan terakhir, penelitian ini telah lolos uji autokorelasi karena nilai $4-dU (2,2684) > DW (2,154) > \text{batas } dU (1,7316)$.

Hasil Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda guna menguji hubungan masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan, dan perekonomian terbuka terhadap kepatuhan pajak. Berikut adalah hasil olah data analisis regresi berganda dalam model penelitian ini:

Tabel 3
Hasil Pengujian

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Koef. Regresi	Signifikansi	R ²
	INKLU	0,942	0,003	
PATUH	DAYA	18,780	0,003	0,368
	BUKA	-0,153	0,035	

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi INKLU (masyarakat inklusif) kurang dari nilai alpha ($0,00 < 0,05$). Hal tersebut berarti bahwa INKLU berpengaruh signifikan terhadap PATUH. Koefisien regresi INKLU bernilai positif menunjukkan adanya pengaruh positif INKLU terhadap PATUH. Nilai koefisien regresi DAYA dalam penelitian ini sebesar 18,780 dan nilai sig. $0,003 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa DAYA berpengaruh positif signifikan terhadap PATUH. Variabel bebas terakhir yaitu BUKA memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha* ($0,035 < 0,05$) dengan koefisien regresi sebesar -0,153. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel BUKA berpengaruh negatif signifikan terhadap PATUH.

Pembahasan

Hipotesis pertama penelitian ini adalah masyarakat inklusif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu H1 penelitian ini diterima dengan didukung oleh hasil nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya

pengaruh signifikan masyarakat inklusif terhadap kepatuhan pajak. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif antara masyarakat inklusif terhadap kepatuhan pajak. Ketika suatu negara memiliki tingkat masyarakat inklusif tinggi, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat yang inklusif mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban mereka (UNDESA, 2009). Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, maka dari itu masyarakat inklusif cenderung akan taat dalam membayar pajak. Masyarakat inklusif terbentuk atas beberapa pilar, dua di antaranya yakni modal sosial dan tata kelola negara. Masyarakat yang bermodal sosial tinggi, cenderung akan patuh membayar pajak karena mereka menganggap tidak membayar pajak merupakan hal yang tidak bertanggungjawab sosial. Selain itu, semakin baik tata kelola negara, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat dan mampu membuat masyarakat patuh untuk membayar

pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan digunakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian untuk hipotesis pertama didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chircop *et al.* (2018); Sebele-mpofu (2020) bahwa masyarakat inklusif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak jika dilihat dari pilar-pilar yang membentuknya. Chircop *et al.* (2018) menyatakan bahwa modal sosial yang tinggi akan mengurangi tingkat penghindaran pajak dan akan berdampak pada tingginya kepatuhan pajak suatu negara. Sebele-mpofu (2020) mengatakan bahwa semakin baik tata kelola negara, maka tingkat kepatuhan pajak menjadi tinggi. Penelitian serupa juga dilakukan Umar *et al.* (2019); Yamen *et al.* (2020) yang meneliti bahwa kualitas tata kelola publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Masyarakat terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak merupakan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Hipotesis kedua tersebut diterima karena hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari α dan koefisien regresi bernilai positif. Masyarakat yang terberdayakan dapat dibentuk oleh beberapa pilar salah satunya dengan pendidikan. Negara makmur mampu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan berkualitas sehingga mampu membentuk sebuah masyarakat yang terberdayakan. Seseorang

yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan memiliki pola pikir maju dan paham akan pentingnya pajak bagi negara maupun masyarakat. Selain itu, pendidikan yang masyarakat dapatkan akan lebih membantu masyarakat paham akan aturan-aturan pajak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar pajak dengan patuh. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat masyarakat terberdayakan di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak di negara tersebut.

Penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa masyarakat terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak berdasarkan pilar pendidikan. Tyas (2013) mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, Richardson (2006) juga mengatakan ketika level pendidikan tinggi, maka tingkat penggelapan pajak dapat dikurangi sehingga mampu menciptakan tingkat kepatuhan pajak tinggi.

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah perekonomian terbuka berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, H3 penelitian ini diterima karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif. Suatu negara dapat menjadi negara yang makmur ketika negara tersebut mampu mempromosikan dengan baik bisnis maupun perdagangannya di luar ataupun dalam negeri untuk memperoleh pendapatan (*The Legatum Institute*

Foundation, 2019). Oleh karena itu, negara makmur akan cenderung memiliki sistem perekonomian terbuka dan menjadikan perekonomian terbuka menjadi aspek untuk mengukur suatu kemakmuran negara. Adanya perekonomian terbuka dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya dengan cara *transfer pricing*. Semakin banyaknya tingkat penghindaran pajak, tentunya akan menyebabkan penerimaan negara jauh dari nilai yang seharusnya negara mampu dapatkan atau *tax effort* negara menjadi rendah. Rendahnya *tax effort* mengindikasikan rendahnya kepatuhan pajak suatu negara. Oleh karena itu, adanya perekonomian terbuka cenderung menyebabkan tingkat kepatuhan negara rendah.

Hasil penelitian untuk H3 didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alison (2007). Penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika perekonomian semakin terbuka, wajib pajak khususnya perusahaan akan cenderung secara efektif melakukan penghindaran pajak, sehingga menyebabkan kepatuhan pajak negara menjadi rendah. Penelitian serupa juga dilakukan Sikka dan Willmott (2010) yang mengatakan ketika perekonomian suatu negara menjadi global atau terbuka, wajib pajak akan memanfaatkan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah aspek-aspek kemakmuran negara yaitu masyarakat inklusif, masyarakat terberdayakan, dan perekonomian terbuka berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat inklusif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang berarti semakin inklusif sebuah masyarakat, maka tingkat kepatuhan pajak suatu negara akan semakin tinggi. Selanjutnya, masyarakat terberdayakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin masyarakat terberdayakan, maka kepatuhan pajak suatu negara semakin tinggi. Terakhir, perekonomian terbuka berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut menunjukkan ketika perekonomian negara semakin terbuka, maka kepatuhan pajak akan semakin rendah.

Penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh aspek kemakmuran negara yaitu masyarakat inklusif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh Chircop *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa modal sosial yang menjadi salah satu pilar masyarakat inklusif dari kemakmuran negara berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberi kontribusi bahwa tidak hanya aspek masyarakat inklusif saja yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek-aspek

kemakmuran negara lainnya yaitu masyarakat terberdayakan dan perekonomian terbuka juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak suatu negara.

Berdasarkan temuan di atas, menciptakan sebuah masyarakat inklusif dan masyarakat terberdayakan dalam sebuah negara sangat diperlukan untuk mencapai sebuah kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah-pemerintah negara di dunia diharapkan melakukan pemberdayaan masyarakat, salah satunya dapat melalui peningkatan kualitas pendidikan mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar masyarakat terberdayakan. Selain itu, memperbaiki tata kelola negara, menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat juga diperlukan untuk membentuk sebuah masyarakat inklusif. Terakhir, pemerintah juga perlu memperketat aturan-aturan pajak di tengah perekonomian terbuka. Hal tersebut bertujuan agar tidak semakin banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak salah satunya melalui *transfer pricing*.

Data kepatuhan pajak yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari data penelitian yang terbatas pada tahun 2015, sehingga bisa saja terdapat perubahan dinamika kepatuhan pajak di berbagai negara di dunia hingga tahun sekarang ini. Hal tersebut dapat menimbulkan bias karena tidak menggambarkan kondisi kepatuhan pajak yang terbaru. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengukur kepatuhan pajak di

berbagai negara dengan indikator yang berbeda yang mampu menggambarkan kondisi terbaru dari kepatuhan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86. <https://doi.org/10.1016/j.soc.2018.12.006>
- Alison, R. (2007). Passing the Burden: Corporate Tax Incidence in Open Economies. In *LIS Working Paper Series* (No. 468). <http://hdl.handle.net/10419/95465>
- ATO. (2019). *How individuals perform against the four pillars of compliance*. <https://www.ato.gov.au/General/Tax-and-individuals---not-in-business/In-detail/How-individuals-perform-against-the-four-pillars-of-compliance/>
- Bărbuță-Mișu, N. (2011). A review of factors for tax compliance. *Economics and Applied Informatics*, 17(1), 69–76.
- Bartelsman, E. J., & Beetsma, R. M. W. J. (2003). Why pay more? Corporate tax avoidance through transfer pricing in OECD countries. *Journal of Public Economics*,

- 87(9–10), 2225–2252.
[https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00018-X](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00018-X)
- Büyüksarıkulak, A. M., & Kahramanoğlu, A. (2019). The prosperity index and its relationship with economic growth: Case of Turkey. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 7(2), 1–30.
- Chircop, J., Fabrizi, M., Ipino, E., & Parbonetti, A. (2018). Does social capital constrain firms' tax avoidance? *Social Responsibility Journal*, 14(3), 542–565.
<https://doi.org/10.1108/SRJ-08-2017-0157>
- Dillenburg, K., McKerr, L., Jordan, J. A., Devine, P., & Keenan, M. (2015). Creating an inclusive society... How close are we in relation to autism spectrum disorder? A general population survey. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 28(4), 330–340.
<https://doi.org/10.1111/jar.12144>
- Downs, A., & Stetson, B. (2014). Economic and non-economic factors: An analysis of corporate tax compliance. *Advances in Taxation*, 21, 37–72.
<https://doi.org/10.1108/S1058-749720140000021002>
- Gardner, M., Roque, L., & Wamhoff, S. (2019). *Corporate tax avoidance in the first year of the trump tax law*.
<https://itep.org/corporate-tax-avoidance-in-the-first-year-of-the-trump-tax-law/>
- Geerken, T., Schmidt, J., Boonen, K., Christis, M., & Merciai, S. (2019). Assessment of the potential of a circular economy in open economies – case of Belgium. *Journal of Cleaner Production*, 227, 683–699.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.120>
- Ibrahim, M., Musah, A., & Abdul-Hanan, A. (2015). Beyond enforcement: what drives tax morale in Ghana? *Humanomics*, 31(4), 399–414.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/H-04-2015-0023>
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik deskriptif & regresi linier berganda dengan SPSS*. Semarang University Press.
- Kangave, J., Nakato, S., Waiswa, R., & Zzimbe, P. (2016). Boosting revenue collection through taxing high net worth individuals: The case of Uganda. In *SSRN Electronic Journal* (Issue February).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2776590>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/#:~:text=Depok%2C14%2F11%2F2018,kepatuhan>

- membayar pajak di Indonesia.&text=Dibandingkan dengan negara-negara lain%2C revenue Indonesia masih rendah.
- Khwaja, M. S., & Iyer, I. (2014). Revenue potential, tax space, and tax gap: a comparative analysis. *World Bank Policy Research Working Paper*, May.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joe.2007.05.004>
- KPMG. (2020). *Individual income tax rates table*. <https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/individual-income-tax-rates-table.html#:~:text=The highest combined personal marginal,Edward Island 51.37%25%3B Newfoundland%26>
- Mawejje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119–129. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.05.005>
- Modugu, K. P., & Anyaduba, J. O. (2014). Impact of tax audit on tax compliance in Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 5(9), 207–215.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” framework. *European Journal of Law and Economics*, 32(1), 89–97. <https://doi.org/10.1007/s10657-011-9236-9>
- Nistotskaya, M., & D’Arcy, M. (2018). The Origins of High Compliance in the Swedish Tax State. In *The Leap of Faith: The Fiscal Foundations of Successful Government in Europe and America* (Issue September). Oxford Scholarship Online. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198796817.001.0001>
- Nugrahanto, R. B. (2017). *Pemberdayaan Wajib Pajak Ciptakan Kepatuhan*. Artikel Direktorat Jendral Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemberdayaan-wajib-pajak-ciptakan-kepatuhan>
- OECD. (1998). *Open markets matter: The benefits of trade and investment liberalisation*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264162938-en>
- Panjaitan, R. E., & Siagian, N. F.

- (2019). Strategi pengembangan pariwisata melalui perubahan pola pikir masyarakat Desa Sigapiton Kabupaten Tobasa. *Jurnal EK&BI*, 2(2), 211–210.
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150–169. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2006.08.005>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64(October), 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joe.2017.10.001>
- Sebele-mpofu, F. Y. (2020). Governance quality and tax morale and compliance in Zimbabwe ' s informal sector. *Cogent Business & Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1794662>
- Setiawan, H. (2013). Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sikka, P., & Willmott, H. (2010). Critical Perspectives on Accounting The dark side of transfer pricing : Its role in tax avoidance and wealth retentiveness. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(4), 342–356. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>
- STA. (2015). *Taxes in Sweden*. <https://www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893f29d0f/1455280476021/taxes-in-sweden-skv104-utgava16.pdf>
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Artikel Pajak Nasional Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- The Legatum Institute Foundation. (2019). *2019 Legatum Prosperity IndexTM*. <https://www.prosperity.com/about/resources>
- Tyas, I. W. (2013). Pengaruh umur, pendidikan, penghasilan bruto, dan moral terhadap kepatuhan pembayaran pajak (Studi empiris WPOP usahawan pada Mall Ciputra). *Tekun*, 4(02), 279–304.
- Umar, M. A., Derashid, C., Ibrahim, I., & Bidin, Z. (2019). Public governance quality and tax compliance behavior in developing countries: The mediating role of socioeconomic conditions. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 338–351.

<https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2016-0338>

UNDESA. (2007). Final Report of the Expert Group Meeting on Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration. In *Division for Social Policy and Development United Nations Department of Economic and Social Affairs*.

UNDESA. (2009). Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration. In *Division for Social Policy and Development United Nations Department of Economic and Social Affairs*.

Yamen, A. E., Mersni, H., & Ramadan, A. (2020). Tax evasion and public governance before and after the European “big bang”: a red flag for policymakers. *Journal of Financial Crime*.
<https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0064>

Young, A., Lei, L., Wong, B., & Kwok, B. (2016). Individual tax compliance in China: a review. *International Journal of Law and Management*, 58(5), 562–574.
<https://doi.org/10.1108/IJL-MA-12-2015-0063>

Zainuddin. (2018). Pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan, kualitas pelayanan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal*

Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 1(1).
<https://doi.org/10.22487/j26223090.2018.v1.i1.10482>